

PERAN LSM DALAM MELAKUKAN ADVOKASI TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH (Studi Kasus LSM Malang Berwarna, Kota Malang)

Muhammad Fiqri Fadillah¹
Aidin²

^{1,2}Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang
Email: mfiqri522@gmail.com

Article Info	
Keyword: NGO's ¹ , Advocates ² , Policy ³ .	Abstract: This research has focused on the role of a non-governmental organization that advocates against the PAUD policy in management are still many forms found differences in the delivery of educational systems. This research method is qualitative descriptive. The results of this research to find out which social Practices undertook NGOs is a form of Colored Poor relations of duality based on her theory of structural discussed by Giddens.
Kata Kunci: NGO's ¹ , Advokasi ² , Kebijakan ³ .	Abstrak: Penelitian ini memiliki fokus pada peran sebuah lembaga swadaya masyarakat yang melakukan advokasi terhadap kebijakan PAUD yang di dalam pengelolaannya masih banyak ditemukan bentuk-bentuk perbedaan penyampaian sistem pendidikannya. Metode penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini untuk mengetahui Praktik sosial yang dilakukan oleh LSM Malang Berwarna merupakan bentuk hubungan dualitas strutural dari agensinya berdasarkan teori yang dibahas oleh Giddens.

PENGANTAR

Pembangunan di dalam negara berkembang seperti Indonesia memang sangat membutuhkan perhatian yang khusus. Semua ini dikarenakan pembangunan memiliki tujuan untuk merubah sebuah tatanan menjadi lebih baik. Selain itu pembangunan merupakan suatu rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian : 2001). Oleh karena itu dibutuhkan sebuah mekanisme pengaturan sistem yang mampu menjaga dimana pembangunan dilaksanakan dalam segala bidang kehidupan. Menurut UU Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan sebuah bangsa, oleh karena itu setiap warga negara harus dan wajib mengikuti jenjang pendidikan, baik jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun tinggi.

Permasalahan tentang penyelenggaraan PAUD juga terjadi di Kota Malang, merujuk pada studi lapang yang dilakukan oleh penulis dalam kegiatannya di dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Malang Berwarna ditemukan banyak penyimpangan mekanisme dalam pengertian implementasi kebijakan. Semua itu dilakukan karena pemerataan pendidikan yang bermutu pada semua jenjang diperlukan adanya sebuah bentuk kolaborasi atau kerjasama antar lembaga, baik itu lembaga daerah, swasta maupun masyarakat.

Menanggapi sebuah ironi pendidikan yang terjadi memang permasalahan akan selalu muncul apabila antara penyelenggara pendidikan dengan pemerintah Kota Malang sendiri tidak dapat menciptakan sebuah pelayanan yang prima. Saat ini PAUD menjadi hal yang modern bagi penduduk ekonomi bawah karena dengan biaya yang murah mereka bisa menyekolahkan anaknya. Dari hasil pengamatan yang didapat penulis dapat menyimpulkan bahwa pelaksanaan program pendidikan anak usia dini di Kota Malang masing kurang merata dikarenakan pemerintah tidak dapat menciptakan pelayanan prima sebagai wujud dari kewajiban daerah

umumnya. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan bagaimana peran yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat Malang Berwarna dalam melakukan advokasi terhadap sebuah kebijakan khususnya bidang pendidikan. Selain itu nantinya dapat menjelaskan bagaimana cara yang dilakukan LSM ini sebagai suatu bentuk kajian dengan penjelasan yang teoritik berdasarkan hubungan agen dan struktur diantara pemerintah dan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif. Hal ini dimaksudkan untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial yang diteliti secara holistik dengan data yang bersifat deskriptif dari kata-kata lisan maupun tertulis dan peristiwa yang dapat diamati. Selain itu penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deskriptif kualitatif, dimana metode yang digunakan menekankan pada proses penelusuran data/informasi hingga dirasakan telah cukup digunakan untuk membuat suatu interpretasi. Penelitian deskriptif dilakukan terhadap variabel mandiri yaitu tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lain, suatu penelitian yang berusaha, menjawab.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif (Miles dan Huberman, 1992: 20). Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan penelitian di lapangan sampai penelitian data selesai dilakukan. Upaya analisis tersebut dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data dan memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat diceritakan pada orang lain.

HASIL DAN DISKUSI

Ketimpangan Masalah Pendidikan

Pendidikan adalah suatu hal yang primer dalam negara, oleh karena itu negara memunculkan sistem dengan wajib belajar duabelas tahun. Artinya individu wajib menempuh pendidikan selama enam tahun Sekolah Dasar, tiga tahun Sekolah Menengah Pertama dan tiga tahun Sekolah Menengah Atas. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat Indonesia mampu memanfaatkan peluangnya dengan semestinya. Sejatinnya menuntut ilmu juga telah dijelaskan dalam kitab suci Al-Qur'an, diantaranya yaitu: Q.S Az-Zumar ayat 9 yang artinya "(apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadah pada malam dengan sujud dan berdiri, karena takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang-orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran". Q.S Al-Mujadalah ayat 11 yang artinya "Wahai orang-orang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, berilah kelapangan di dalam majelis-majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman diantaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Peran Lembaga Swadaya Masyarakat Malang Berwarna Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kota Malang

Kemaslahatan umum menjadi tugas utama pemerintah. Ketika infrastruktur sudah tersedia dengan baik, swasta juga mempunyai peran besar dalam kemitraan dengan pemerintah untuk mewujudkan good governance. Disinilah peran masyarakat dalam memberikan perhatian terhadap penyelenggaraan pemerintahan agar tetap berjalan sesuai pada track yang ada. Dapat dikatakan bahwa masih besarnya dominasi pemerintah dalam proses-proses pembuatan kebijakan, perencanaan pembangunan, penganggaran, penyelenggaraan pelayanan publik serta pengelolaan sumber daya dan asset daerah. Dalam banyak kasus, proses-proses penyelenggaraan pemerintah juga ditandai oleh adanya patron-klien" antara pemerintah, pejabat, dan pihak-pihak yang ingin memanfaatkan keputusan dan sumber daya lokal untuk kepentingan pribadi atau kelompoknya. Masyarakat hanya dilibatkan pada tahapan paling awal sebagai bentuk pencarian legitimasi, tetapi masih sulit untuk memantau status aspirasi mereka di tingkat berikutnya,

termasuk ketika telah menjadi dokumen peraturan daerah, perencanaan dan anggaran untuk diimplementasikan. Partisipasi yang dikembangkan barusebatas partisipasi simbolik (*degree of tokenism*), bahkan masih ditemukan partisipasi yang bersifat manipulatif sehingga tidak layak disebut sebagai partisipasi. Peningkatan peran serta masyarakat dalam upaya lembaga swadaya masyarakat ini dilakukan dengan sebuah pembentukan forum diskusi bagi orang tua murid. Tindakan ini menunjukkan bahwa proses pembentukan mekanisme kontrol dilakukan secara partisipatif.

Praktik Sosial LSM Malang Berwarna Dalam Manajemen Advokasi Terhadap Kebijakan PAUD Kota Malang

Praktik sosial merupakan hubungan antara pelaku (tindakan) dan struktur berupa relasi dualitas. Dalam pandangan strukturasi obyektivitas struktur tidak bersifat eksternal melainkan melekat pada tindakan dan praktek sosial yang dilakukan. Oleh karena itu ada tiga gugus struktur yaitu:

1. Struktur penandaan atau signifikansi yang menyangkut simbolis, pemaknaan, penyebutan, dan wacana.
2. Struktur penguasaan atau dominasi yang menyangkut skema penguasaan atas orang (politik) dan barang produktif (ekonomi).
3. Struktur pembenaran atau legitimasi yang menyangkut peraturan normatif.

Kaitan ketiga struktur tersebut menyatakan bahwa reproduksi sosial dilahirkan melalui dualitas struktur (fakta sosial dan definisi sosial) dalam praktik sosial. Disini lembaga swadaya masyarakat memiliki sebuah bentuk kinerja yang maksimal untuk peningkatan peran serta masyarakat agar dapat dikaitkan dengan proses kebijakan publik. Lembaga swadaya masyarakat Malang Berwarna seakan memberikan banyak cara untuk menghimpun kekuatan berdasarkan partisipasi masyarakat. Hubungan ini dapat digambarkan di dalam skema gambar mengenai teori strukturasi Giddens dimana inti dari praktik sosial ini mencerminkan relasi dualitas struktur dengan yang lainnya. legitimasi pemerintah dalam membuat sebuah kebijakan baru yang lebih tepat. Peran serta sebuah lembaga swadaya masyarakat ini berdampak pada pengembangan masyarakat sipil dimana untuk melakukan sebuah kontrol kebijakan diperlukan banyak agen-agen yang terdiri dari beragam kalangan. Selain menjadi pengawas terhadap Negara, LSM juga bertugas memberikan pendidikan bagi masyarakat tentang cara audit sosial dalam mekanisme kontrol kebijakan.

Agensi LSM Malang Berwarna Dalam Advokasi Kebijakan PAUD di Kota Malang

Teori strukturasi merupakan teori umum dari aksi sosial. Teori ini menyatakan bahwa lembaga swadaya masyarakat adalah proses mengambil dan meniru beragam sistem sosial. Dengan kata lain, tindakan LSM adalah sebuah proses memproduksi dan mereproduksi sistem-sistem sosial yang beraneka ragam. Disini lembaga swadaya masyarakat diibaratkan sebagai sebuah individu. Interaksi antar individu dapat menciptakan struktur yang memiliki *range* dari masyarakat yang lebih besar dan institusi budaya yang lebih kecil yang masuk dalam hubungan individu itu sendiri. Individu yang menjadi komunikator bertindak secara strategis berdasarkan pada peraturan untuk meraih tujuan mereka dan tanpa sadar menciptakan struktur baru yang mempengaruhi aksi selanjutnya. Hal ini karena pada saat individu itu bertindak dalam rangka memenuhi kebutuhannya, tindakan tersebut menghasilkan konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*) yang memapankan suatu struktur sosial dan mempengaruhi tindakan individu itu selanjutnya.

Struktur dinyatakan seperti hubungan pengharapan, kelompok peran dan norma-norma, jaringan komunikasi dan institusi sosial dimana keduanya berpengaruh dan dipengaruhi oleh aksi sosial. Struktur memfasilitasi individu dengan aturan yang membimbing tindakan mereka. Akan tetapi, tindakan mereka juga bertujuan untuk menciptakan aturan-aturan baru dan mereproduksi yang lama. Dengan demikian agensi yang dilakukan oleh LSM ini dalam bentuk mekanisme kontrol kebijakan sebagai pengawas eksternal diluar struktur yang ada. Mengkaji strukturasi sistem sosial berarti mengkaji mode-mode tempat diproduksi dan direproduksinya sistem-sistem seperti itu dalam interaksi, yang didasarkan pada aktivitas-aktivitas utama aktor-aktor ditempat tertentu.

Kendala yang Dihadapi LSM Malang Berwarna Dalam Pelaksanaan Advokasi Kebijakan PAUD

Teori strukturasi, yang menekankan signifikansi struktur masyarakat dan agen manusia, bisa digunakan untuk menjelaskan bagaimana kendala yang dihadapi oleh lembaga swadaya masyarakat. Dalam teori strukturasi Giddens, agen/pelaku, seperti telah dijelaskan, dipahami sebagai *knowledgeable and capable subject* dan tindakan-tindakan mereka bertujuan. Dan juga, dalam pembuatan putusan, seorang pelaku mungkin akan menghitung resiko-resiko (untung-rugi), atau menggunakan *cost-benefit analysis*.

Seorang individu atau agen membuat putusan-putusan yang didasari pada karakteristik-karakteristik personal. Dan ia tidak sepenuhnya membuat putusan-putusan yang rasional dalam hal migrasi. Putusan-putusan yang dibuat memunculkan konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan (*unintended consequences*). Sebagai contoh adalah pemaksaan tenaga pendidik yang tidak memiliki kemampuan dalam pendidikan anak usia dini. Ini bukan merupakan tujuan dari seorang yang menyekolahkan anaknya, namun seringkali menjadi sebuah konsekuensi.

Struktur juga merupakan faktor berpengaruh terhadap kebijakan PAUD. Pengaruh ekonomi dan politik yang terus berubah cenderung memunculkan sejumlah besar permasalahan bagi agen perubahan. Ini memberikan kontribusi bagi faktor-faktor struktural-pendidikan anak usia dini yang sangat menentukan tentang proses pembuatan keputusan mengenai PAUD ini. Dualitas struktur merupakan aspek penting lainnya dalam pikiran Giddens. Dalam kajian tentang kendala yang di hadapi LSM, interaksi antara faktor-faktor penentu yang bersifat struktural dan juga *proximate* mendemonstrasikan pentingnya dualitas struktur.

Upaya yang Dilakukan LSM Malang Berwarna

Peningkatan mutu pendidikan, tidak dapat terlaksana tanpa pemberian kesempatan sebesar-besarnya pada sekolah yang merupakan ujung tombak terdepan untuk terlibat aktif secara mandiri mengambil keputusan tentang pendidikan. Sekolah harus menjadi bagian utama sedangkan masyarakat dituntut partisipasinya dalam peningkatan mutu yang telah menjadi komitmen sekolah demi kemajuan masyarakat. Peningkatan mutu hanya akan berhasil jikalau ditekankan adanya kemandirian dan kreativitas sekolah. Proses pendidikan menyangkut berbagai hal diluar proses pembelajaran, seperti misalnya lingkungan sekolah yang aman dan tertib, misi dan target mutu yang ingin dicapai setiap tahunnya, kepemimpinan yang kuat, harapan yang tinggi dari warga sekolah untuk berprestasi, pengembangan diri, evaluasi yang terus menerus, komunikasi dan dukungan intensif dari pihak orang tua, masyarakat.

Hubungan sekolah-masyarakat adalah untuk meningkatkan keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat baik dukungan moral maupun finansial. Masyarakat di sini meliputi masyarakat setempat dimana sekolah itu berada, orang tua murid, masyarakat pengguna pendidikan yang memiliki kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Disinilah upaya yang dilakukan oleh LSM Malang Berwarna sebagai sebuah *civil society* yang memiliki peran sebagai mediator partisipasi masyarakat untuk dapat meningkatkan perannya dalam membentuk sebuah sistem pendidikan yang berkualitas. Oleh karenanya peran serta masyarakat inilah yang dapat menggerakkan PAUD di wilayah yang tidak dijangkau oleh pemerintah daerah.

KESIMPULAN

Praktik sosial yang dilakukan oleh LSM Malang Berwarna dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pemerintah bidang PAUD di Kota Malang dengan meningkatkan peran serta masyarakat merupakan sebuah dualitas struktur. Karena banyak tindakan seperti strategi, upaya dan kontribusi dalam perilaku kontrol kebijakan PAUD ini yang tidak terlepas dari aturan perundangan mulai UUD 1945 sampai Peraturan Daerah itu sendiri. Disamping itu dalam melakukan strategi dan kontribusi pelaksanaan kontrol kebijakan PAUD juga melakukan sebuah terobosan baru yang ada dalam kajian Giddens yaitu proses signifikansi, dominasi dan legitimasi juga tidak terlepas peran partisipatif orang tua. Hal ini dikarenakan agen dan struktur bersifat saling melengkapi atau timbale balik satu sama lain. Secara langsung peran aktif LSM ini terdapat pada pengembangan masyarakat sipil untuk mau berpartisipasi langsung dalam pengawalan kebijakan. Peran serta masyarakat atau orang tua sangatlah penting bagi LSM untuk membentuk

budaya partisipatif agar kinerja pemerintah dapat terkontrol dengan baik. Semua ini demi tegaknya kebijakan, apalagi kebijakan tentang pendidikan anak usia dini yang merupakan pilar utama pembangunan di masa yang akan datang. Oleh karena itu pola pengembangannya juga komunikatif agar masyarakat dapat langsung menerima dengan mudah. Dengan sebuah manajemen advokasi yang dilakukan oleh LSM Malang berwarna ini dapat menjawab permasalahan yang terjadi di PAUD Kota Malang yang diakibatkan ketidakpedulian pemerintah Kota Malang terhadap PAUD. Semua ini ditunjukkan dengan memunculkan permasalahan itu kedalam sebuah bingkai advokasi agar masyarakat serta tenaga pendidik dapat berjalan dengan mandiri memperjuangkan PAUD yang mereka kelola agar prestasi dan mutu di dalamnya dapat berjalan sesuai harapan dari kebijakan.

REFERENSI

- Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi menuju demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1993
- Afan Gaffar, *Demokrasi Indonesia: Masa lampau, masa kini dan masa mendatang*, Paper seminar AIPi, Jakarta 1993
- Creswell, J.W. 2002. *Research Design: Qualitative and Quantitative Approaches*. California: Sage Publications
- Creswell, J.W. 2009. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Penerjemah Achmad Fawaid. 2010. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Enung, F. *Psikologi perkembangan : perkembangan Peserta didik*. 2006. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Giddens. A. 1984. *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Stucturation*. Penerjemah Adi Loka Sujono. 2003. Teori Strukturasi untuk Analisis Sosial. Pasuruan: Pedati
- Giddens. A. 1984. *The Constitution of Society: The Outline of the Theory of Stucturation*. Penerjemah Maufur dan Daryanto. 2010. *Teori Strukturasi: Dasar-dasar Pembentukan Struktur Sosial Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Giddens. A., 1987. *The Nation-State and Violence*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press.
- Giddens. A., 1999. *Jalan Ketiga Pembaruan Demokrasi Sosial*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Giddens. A., 2000. *Jalan Ketiga: Pembaruan Demokrasi Sosial*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Miles, M.B dan A. Michael Hubermas. 1984. *Qualitative Data Analysis*. Penerjemah Tjejep Rohendi Rohidi. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya Pemerintahan Desa Paciran. 2011. Monografi Desa Paciran 2011. Lamongan: Badan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lamongan
- Muhammad A.S. Hikam, *Civil Society dan Demokrasi*, LP3ES, Jakarta, 1995.
- Suhartono, Martin. 2000. Basis edisi khusus Anthony Giddens. Jakarta: Gramedia
- Suyanto, Bagong, dan Sutina. 2007. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Edisi Pertama. Jakarta : Kencana
- S. Nasution. 1995. *Metode Research*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Qodri, Azizi, A., 2007, *Change Management Dalam Reformasi Birokrasi*. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Abeng,
- Wibowo, I. 2000. Basis edisi khusus Anthony Giddens. Jakarta: Gramedia
- Yin, Robert K, (2006), *Studi Kasus; Desain dan Metode*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

